

## **KATA PENGANTAR**

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2018 ini merupakan perubahan rencana tahunan sebagai usulan lebih lanjut dari Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2021 , yang berjangka waktu 5 (lima) tahunan. Untuk Perubahan Rencana Kinerja Tahun 2018 ini telah disesuaikan dengan Perubahan RKPD tahun 2018.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja yang merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan ini, akan menjembatani Rencana Strategis dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan sistem penganggaran. Pada Tahun Anggaran 2018, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul telah merencanakan untuk melaksanakan 29 Kegiatan dari 8 Program.

Perubahan Rencana Kinerja ini diharapkan menjadi pedoman bagi jajaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul untuk melaksanakan kegiatan, guna pencapaian akuntabilitasnya secara optimal.

Bantul, 23 Juli 2018

Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu  
Kabupaten Bantul



Ir. Sri Muryuwantini, MM  
NIP. 19620309 198903 2 002

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN BANTUL.....	ii
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL .....	vii
 BAB I PENDAHULUAN .....	
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. LANDASAN HUKUM.....	4
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN .....	6
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN.....	7
 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2018	
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2018 .....	5
2.2. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH, CAPAIAN KINERJA SERTA FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG....	10
 BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN BANTUL.....	12
 BAB IV PENUTUP.....	22

## **DAFTAR TABEL**

TABEL 1	REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DPMPT DAN PENCAPAIAN RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2018 .....	6
TABEL 2	RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN .....	17

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul sebagai OPD penyelenggara urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu mempunyai indikator kinerja, yang salah satunya adalah pertumbuhan investasi.

Kegiatan investasi (penanaman modal) merupakan salah satu instrumen dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Perkembangan penanaman modal sangat dipengaruhi oleh kondusif-tidaknya iklim penanaman modal. Iklim penanaman modal sangat ditentukan oleh kebijakan di bidang penanaman modal, baik menyangkut peraturan di bidang penanaman modal, maupun peraturan pelaksanaannya yang akan berdampak pada sistem dan prosedur pelayanan kepada investor.

Lemahnya penegakan peraturan di bidang penanaman modal menyebabkan terjadinya inefisiensi dalam pelayanan penanaman modal kepada investor. Hal seperti ini akan berdampak pada lemahnya daya saing daerah dalam menarik penanaman modal terutama penanaman modal asing.

Selain tidak ditunjang oleh perangkat peraturan yang mendukung pelaksanaan program peningkatan penanaman modal, kendala dalam pemberian pelayanan kepada investor juga terjadi karena:

1. tidak diimbangi dengan tersedianya sarana prasarana pendukung;
2. kualitas aparat pelayanan penanaman modal yang belum sepenuhnya menguasai peraturan di bidang penanaman modal; serta

3. belum adanya kesamaan persepsi diantara instansi yang terkait dengan pelayanan penanaman modal dalam memandang keberadaan investor yang akan menanam modal di daerah.

Dalam rangka perbaikan iklim penanaman modal, Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM RI) melakukan beberapa upaya, antara lain:

1. Mendorong terciptanya kepastian hukum melalui penyederhanaan dan harmonisasi peraturan terkait penanaman modal (deregulasi peraturan);
2. Memberikan kemudahan pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal melalui penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal baik di Tingkat Pusat (BKPM), Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
3. Mengembangkan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dan penyediaan online tracking system. Jenis perizinan yang telah dapat dilayani melalui SPIPISE adalah: Izin Prinsip, Izin Usaha dan Surat Persetujuan Pembebasan Bea Masuk Barang Modal dan Bahan Baku.

Selaras dengan upaya yang ditempuh oleh BKPM RI, Badan Kerjasama Penanaman Modal (BKPM) DIY juga berupaya untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif di DIY.

Visi BKPM DIY adalah ” Terwujudnya Iklim Penanaman Modal Yang Berdaya Saing untuk Menunjang Kualitas Perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta “

Untuk mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui 3 (tiga) misi BKPM DIY sebagai berikut:

1. Mendorong peningkatan realisasi dan pemerataan penanaman modal yang didukung oleh promosi dan kualitas pelayanan penanaman modal;
2. Mendorong pengembangan jejaring kerjasama untuk mendukung pembangunan daerah;
3. Mendorong terwujudnya hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, masyarakat DIY di Jakarta dan pihak swasta

Secara regional, investasi di DIY masih terkonsentrasi di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta dengan porsi yang mencapai sekitar 90% baik untuk PMDN maupun PMA. Ada beberapa hal yang bisa menyebabkan pengelompokan investasi (*aglomerasi*), antara lain daya dukung infrastruktur, SDM, dan faktor lain yang dapat mempengaruhi efisiensi produksi. Dengan visi dan misi yang telah dirumuskan, BKPM DIY berharap dapat terjadi pertumbuhan realisasi investasi yang cukup signifikan di DIY, terutama di wilayah kabupaten Kulonprogo, Gunungkidul dan Bantul yang memang masih tertinggal dari wilayah Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta.

Mengacu pada kebijakan BKPM RI dan BKPM DIY, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu terpacu untuk berupaya membangun iklim penanaman modal yang lebih kondusif di Bantul. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Tahun 2016 – 2021 dan Rencana Kerja (Renja) tahunan, menjadi tonggak awal upaya peningkatan nilai investasi daerah.

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul Tahun 2018 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan renja sampai dengan triwulan II tahun 2018, meliputi evaluasi pencapaian target program dan kegiatan, analisis kinerja pelayanan dinas,

review perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), penelaahan usulan program dan kegiatan Masyarakat, dan penelaahan kebijakan Nasional/DIY/Kabupaten, khususnya di bidang Penanaman Modal.

Tahun Anggaran 2018 adalah tahun kedua dari pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul 2016 - 2021 yang dituangkan dalam Perubahan Renja Tahun 2018 yang memuat rencana program dan kegiatan, serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD tahun tersebut.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul antara lain :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan PTSP;
4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara

Elektronik;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
10. Peraturan Kepala Badan koordinasi dan Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik;
11. Peraturan Kepala BKPM RI Nomor 9 Tahun 2017 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal ;
12. Peraturan Kepala BKPM RI Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal;
13. Peraturan Kepala BKPM RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan /Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman



Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2015-2019;

15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Penanaman Modal Republik Indonesia;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2021;
17. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Bantul;
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul.
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 80 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor ...Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bantul Tahun 2018.

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul adalah sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2018.

Sedangkan Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa dokumen tersebut sebagai bahan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), prioritas dan Pagu Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD).

#### **1.4. SISTIMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul disusun menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 2018, meliputi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD sampai Triwulan II Tahun 2018

Bab ini memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu sampai Triwulan II Tahun 2018 dan Gambaran Pelayanan OPD, Capaian Kinerja serta Faktor Penghambat dan Pendorong

Bab III : Rencana Kerja dan Pendanaan OPD

Bab ini berisi Rumusan Rencana Program dan Kegiatan beserta Anggaran Sebelum dan Sesudah Perubahan, Poin-poin yang mengalami Perubahan dan Penyebab Perubahan

Bab IV : Penutup

Bab ini berisi Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dan rencana tindak lanjut

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018

#### 2.1 HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KAUPATEN BANTUL SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2018

**Tabel 1**

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja DPMPT s/d Triwulan II 2018  
Kabupaten Bantul**

No	Sasara n	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2018			Realisasi Kinerja Pada Triwulan					Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PDTahun 2018 (%)	
							I		II						
1	2	3	4	7			8		9			12		X = 12/7 x 100%	
				K	Rp		K	Rp	K	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		BELANJA LANGSUNG				3.345.701.455,00		380.919.352,00			1.403.802.130	0	1.403.802.130		41,96 %
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 perse n	100	1.082.350.150,00		75.074.752,00			379.487.780	0	379.487.780		35,06 %
		Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapa n Perkantoran	Jumlah orang(pengelo la administrasi keuangan)/b ulan yang terbayar honornya	120 ob	120	157.051.800,00	0	6.460.892,00	60 ob	60	33.852.342	60	33.852.342	50,00 %	21,55%

		Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah orang/hari yang melaksanakan rapat dan perjalanan dinas	1500 oh	1500	627.814.750,00	1250h	53.221.860,00	944 oh	944	217.056.210	944	217.056.210	62,93 %	34,57%
		Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Jumlah orang( pengelola pelayanan perkantoran) /bulan yang terbayar honor dan premi kesehatannya	143 ob	143	297.483.600,00	110b	15.392.000,00	65 ob	65	128.579.228	65	128.579.228	45,45 %	43,22%
		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase cakupan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>100 persen</b>	<b>100</b>	<b>437.650.000,00</b>		<b>38.832.100,00</b>			<b>162.217.850</b>	<b>0</b>	<b>162.217.850</b>		<b>37,07 %</b>
		Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	4 unit	4 unit	4	80.490.000,00	0,00	0,00	3 unit	3	-	3	-	75,00 %	
		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor	8 unit	8	78.150.000,00	0,00	0,00	7 unit	7	75.000.000	7	75.000.000	87,50 %	95,97%
		Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	Jumlah pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	12 bulan	12	27.500.000,00	3 bulan	8.476.500,00	6 bulan	6	8.776.500	6	8.776.500	50,00 %	31,91%
		Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan dinas yang terpelihara	10 unit	10	233.510.000,00	2 unit	28.521.600,00	6 unit	6	74.717.350	6	74.717.350	60,00 %	32,00%
		Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	12 bulan	12	18.000.000,00	3 bulan	1.834.000,00	6 bulan	6	3.724.000	6	3.724.000	50,00 %	20,69%

		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>persentase sumberdaya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidang nya</b>	<b>100 persen</b>	<b>100</b>	<b>97.749.950,00</b>		<b>0,00</b>							
											<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>		
		Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur	Jumlah pelaksanaan Bimtek Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1 kegiatan	1	97.749.950,00		0,00	0		0	0	-		
		<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Presentase cakupan peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja</b>			<b>126.190.000,00</b>		<b>450.000,00</b>			<b>11.623.500</b>	<b>0</b>	<b>11.623.500</b>		<b>9,21%</b>
		Penyusunan sistem manajemen mutu	1 sertifikat	1 sertifikat	1	113.500.000,00	0 , 0 0	450.000,00	0		6.437.500	0	6.437.500		5,67%
		Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan	Jumlah pelaksanaan koordinasi program dan kegiatan	4 kali	4	5.190.000,00	0 , 0 0	0,00	2 kali	2	936.000	2	936.000	50,00 %	18,03%
		Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	Jumlah laporan kinerja perangkat daerah	12 dokumen	12	7.500.000,00	0 , 0 0	0,00	6 dokumen	6	4.250.000	6	4.250.000	50,00 %	56,67%
		<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>	<b>Jumlah investor yang berinvestasi</b>			<b>333.225.000,00</b>		<b>10.175.000,00</b>			<b>184.677.500</b>	<b>0</b>	<b>184.677.500</b>		<b>55,42 %</b>

		Peningkatan Koordinasi Kerjasama di Bidang Penanaman Modal	Jumlah kegiatan Temu Bisnis	2 kali	2	15.050.000,00	0 , 0 0	4.625.000,00	2 kali	2	15.050.000	2	15.050.000	100,0 0%	100,00 %
		Peningkatan Promosi Penanaman Modal	Jumlah kegiatan promosi potensi dan peluang penanaman modal	3 kegiatan	3	147.625.000,00	0 , 0 0	4.950.000,00	1 kali	1	47.900.000	1	47.900.000	33,33 %	32,45%
		Pengembangan Potensi Penanaman Modal	Jumlah kegiatan pengembangan potensi penanaman modal	3 kegiatan	3	170.550.000,00	1	600.000,00	2 kali	2	121.727.500	2	121.727.500	66,67 %	71,37%
		<b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>	<b>Persentase realisasi investasi</b>			<b>137.875.000,00</b>		<b>1.050.000,00</b>			<b>67.977.500</b>	<b>0</b>	<b>67.977.500</b>		<b>49,30 %</b>
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan PMA/PMDN yang menjadi objek pemantauan, pembinaan, dan pengawasan penanaman modal	75 kali	75	51.325.000,00	2 3	550.000,00	48	48	49.477.500	48	49.477.500	64,00 %	96,40%
		Pengembangan Kebijakan Penanaman Modal	Jumlah Kajian penanaman modal	1 dokumen	1	86.550.000,00	0 , 0 0	500.000,00	0		18.500.000	0	18.500.000		21,37%
		<b>Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi</b>	<b>cakupan Aplikasi SIM dalam Layanan Perizinan dan Nonperizina</b>			<b>324.075.355,00</b>		<b>228.895.000,00</b>			<b>233.045.000</b>	<b>0</b>	<b>233.045.000</b>		<b>71,91 %</b>

			n												
		Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	Jumlah aplikasi SIM pelayanan perizinan online	1 aplikasi	1	324.075.355,00	1 aplikasi	228.895.000,00	1 aplikasi	1	233.045.000	1	233.045.000	100,00%	71,91%
		<b>Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintahan</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	-		
		Pendampingan pelaksanaan standar manajemen mutu		0,00	0	0,00	0,00	0,00	0			0	-		
		<b>Program Peningkatan Pengelolaan Perijinan</b>	<b>Cakupan Peningkatan Pengelolaan Perizinan</b>			<b>806.586.000,00</b>		<b>26.442.500,00</b>			<b>364.773.000</b>	<b>0</b>	<b>364.773.000</b>		<b>45,22%</b>
		Sosialisasi pengelolaan perijinan	Jumlah pelaksanaan sosialisasi	10 kali	10	238.870.000,00	0,00	2.500.000,00	7 kali	7	191.300.000	7	191.300.000	70,00%	80,09%
		Operasional pelayanan perijinan	Jumlah barang cetakan pelayanan perizinan	7 jenis	7	53.150.000,00	1 jenis	6.500.000,00	3 jenis	3	21.017.000	3	21.017.000	42,86%	39,54%
		Pendataan dan penetapan perijinan	Jumlah izin yang ditetapkan dalam satu tahun	6000 izin	6000	110.375.000,00	449 izin	7.815.000,00	3043 izin	3043	66.655.000	3043	66.655.000	50,72%	60,39%



		Penyelesaian pengaduan dan wasdal perijinan	Jumlah Persentase penanganan pengaduan yang tertangani	100%	100	13.913.000,00	0 , 0 0	1.010.000,00	0		3.365.000	0	3.365.000		24,19%
		Pengkajian peraturan daerah tentang perijinan	Jumlah kajian perda tentang perizinan dan PM	2 perda	2	75.130.000,00	0 , 0 0	4.397.500,00	1 perda	1	30.645.000	1	30.645.000	50,00 %	40,79%
		Pengelolaan perijinan online	Jumlah paket pengelolaan perizinan online	1 paket	1	186.325.000,00	0 , 0 0	0,00	0		6.307.000	0	6.307.000		3,38%
		Survei kepuasan masyarakat	Jumlah pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat	2 kali	2	6.525.000,00	0 , 0 0	1.825.000,00	1 kali	1	2.430.000	1	2.430.000	50,00 %	37,24%
		Penyampaian informasi perijinan melalui pameran bantul ekspso	Jumlah pelaksanaan pameran bantul ekspso	1 kali	1	29.070.000,00	0 , 0 0	0,00	0		-	0	-		
		Lokakarya penanganan pengaduan	Jumlah pelaksanaan loka karya Penanganan Pengaduan	1 kali	1	23.084.000,00	0 , 0 0	0,00	1 kali	1	22.334.000	1	22.334.000	100,00 %	96,75%
		Pengawasan dan Pengendalian Perijinan	Jumlah pengawasan dan pengendalian terhadap proses pelayanan izin terbit	420 izin	420	46.084.000,00	1 0 5 iz in	2.395.000,00	268 izin	268	20.720.000	268	20.720.000	63,81 %	44,96%
		Lokakarya Pengawasan dan Pengendalian Perizinan	Jumlah pelaksanaan loka karya Pengawasan dan Pengendalian Perizinan	1 kali	1	24.060.000,00	0 , 0 0	0,00	0			0	-		

		<b>JUMLAH</b>			<b>3.345.701.455,00</b>		<b>380.919.352,00</b>			<b>1.403.802.130</b>				
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>													<b>62,38</b> %	<b>43,31</b> %
<b>Predikat kinerja</b>														

## **2.2 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH, CAPAIAN KINERJA SERTA FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG**

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan rencana kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul sampai dengan triwulan II Tahun 2018, secara umum dapat disimpulkan memuaskan, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian untuk perbaikan yang akan datang, agar kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul terus meningkat secara berkelanjutan. Ketepatan penyerapan anggaran masih perlu perbaikan, realisasi fisik telah tercapai sebesar 62,38% namun realisasi keuangan tercapai sebesar 43,31%. Faktor penghambat pencapaian kinerja terutama disebabkan rencana operasional pelaksanaan kegiatan fisik perangkat daerah yang bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan eksternal sehingga mempengaruhi ketepatan penyerapan anggaran berdasarkan rencana operasional pelaksanaan kegiatan keuangan. Namun, adanya komitmen dan kerjasama seluruh jajaran perangkat daerah, penerapan budaya kerja yang baik serta peningkatan SDM dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja akan menjadi faktor penentu keberhasilan guna mewujudkan kinerja yang akuntabel dan berorientasi pada hasil.

Perkembangan lingkungan strategis organisasi berkembang pesat dan cepat. Kemajuan teknologi informasi mendorong percepatan perubahan lingkungan organisasi. Kondisi tersebut menyebabkan perkembangan permasalahan organisasi semakin kompleks. Demikian halnya yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu.

Berdasarkan data empiris yang terjadi dan analisis lingkungan organisasi dapat diidentifikasi permasalahan yang dihadapi. Pertama, lingkungan internal merupakan faktor yang dapat dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul meliputi kekuatan dan kelemahan. Kedua, lingkungan eksternal merupakan faktor yang tidak dapat dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu meliputi peluang dan tantangan.

a. Faktor Kekuatan Organisasi:

- 1) Landasan hukum kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul;
- 2) Landasan hukum penyelenggaraan layanan penanaman modal dan pelayanan terpadu;
- 3) Adanya komitmen Kepala Dinas dan seluruh jajaran untuk mewujudkan dan memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian visi misi.

b. Faktor Kelemahan Organisasi

- 1). Kuantitas dan kualitas aparat yang belum memadai sesuai

kebutuhan;

- 2). Sarana dan prasarana yang belum memadai sesuai kebutuhan;
- 3). Media Informasi yang terbatas;

c. Faktor Peluang Organisasi

- 1). Kebijakan pemerintah tentang otonomi daerah, kelembagaan daerah serta pedoman nomenklatur instansi PTSP di daerah;
- 2). Upaya deregulasi urusan penanaman modal dan PTSP;
- 3). Kemajuan di bidang media teknologi dan informasi;

d. Faktor Tantangan Organisasi

- 1). Kebijakan yang tumpang tindih dan sering berubah;
- 2). Belum adanya kesepahaman dan sinergitas dari stakeholder terkait;
- 3). Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan

birokrasi.

Dengan memperhatikan faktor kelemahan organisasi dan tantangan organisasi serta dengan memperhitungkan faktor kekuatan organisasi dan peluang organisasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu akan melaksanakan hal-hal, sebagai berikut:

- 1) Pelimpahan kewenangan urusan penanaman modal dan penyelenggaraan PTSP;
- 2) Sinkronisasi deregulasi;
- 3) Pembangunan sistem yang terintegrasi berbasis teknologi dan informasi;
- 4) Penguatan dan pengembangan kinerja kelembagaan;
- 5) Penguatan dan pengembangan sistem sinergitas antar stakeholder;

- 6) Penerapan Standar Mutu Manajemen/Implementasi ISO;
- 7) Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah;
- 8) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 9) Pengembangan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik;
- 10) Penyusunan, Penerapan, dan Monev Standar Pelayanan;
- 11) Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Program Kegiatan dengan Skala Prioritas;
- 12) Sosialisasi, Promosi dan Kerjasama Investasi serta Peningkatan Pelayanan Perizinan;

### **BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana Kerja perangkat daerah dijabarkan dan tertuang dalam rumusan program dan kegiatan. Pada perubahan rencana kerja tahun 2018 dilatarbelakangi baik faktor internal maupun eksternal yang menjadi skala prioritas untuk dilaksanakan, yakni penyelenggaraan pelayanan perizinan melalui satu pintu/PTSP dengan bergabungnya Tim Teknis dari OPD Terkait pada Dinas Penanaman Modal Kabupaten Bantul dan implementasi *Online Single Submission/OSS* atau perizinan berusaha terintegrasi secara online yang berskala nasional pada waktu mendatang.

Rumusan Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal Kabupaten Bantul Tahun 2018 terdiri dari 8 (delapan) program dan 29 (dua puluh sembilan) kegiatan dengan pagu anggaran sebelum perubahan sebesar Rp 3.345.701.455,- (Tiga miliar tiga ratus empat puluh lima juta tujuh ratus satu ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) dan sesudah perubahan sebesar **Rp 3.670.451.455,- (Tiga miliar enam ratus tujuh puluh juta empat ratus lima puluh satu ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).** Perubahan rencana kerja tahun 2018 pada pagu anggaran program kegiatan, sebagai berikut:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran;
- b. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi);
- c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan;
- d. Program Peningkatan Pengelolaan Perizinan Kegiatan Pengelolaan Perizinan online.

Rincian Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal Kabupaten Bantul Tahun 2018 beserta perubahan pagu anggaran selengkapnya disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 2**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Tahun 2018**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiat an	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2018							Sumber Dana	Keterangan
				Lokasi		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Pagu Indikatif				
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Selisih (+ / -)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.12 - 2.12.0101 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							1.082.350.150	1.106.350.150	24.000.000		
2.12 - 2.12.0101 - 1.36	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	tersedianya bahan bacaan	tersedianya bahan bacaan	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	12 bulan	12 bulan	157.051.800	157.051.800	0	APBD	
2.12 - 2.12.0101 - 1.37	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi		tercukupinya akomodasi (makan minum) untuk penerimaan tamu1011 oh dan pengiriman personil pelatihan OSS	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	12 bulan	12 bulan	627.814.750	655.747.250	27.932.500	APBD	Penambahan penyediaan akomodasi untuk kunjungan tamu dengan menambah anggaran premi asuransi yang tidak bisa dibelanjakan
2.12 - 2.12.0101 - 1.38	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	honor keamanan	honor keamanan	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	2 orang	2 orang	297.483.600	293.551.100	-3.932.500	APBD	Pagu premi asuransi untuk pegawai non PNS belum sesuai standar yang ditetapkan BPJS sehingga anggaran tidak dibelanjakan dan digeser untuk menambah penyediaan akomodasi tamu ( belanja makan minum tamu )
2.12 - 2.12.0101 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	- Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	- Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur			-98 %	-98 %	437.650.000	536.900.000	99.250.000		
2.12 - 2.12.0101 - 2.49	Pembangunan/R ehabllitasi Rumah dan Gedung Kantor		Rehabilitasi Ruang Pelayanan		Kabupaten Bantul		2 bulan	80.490.000	96.365.000	15.875.000	APBD	

2.12 - 2.12.0101 - 2.51	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	honor keamanan	Pengadaan meja partisi dan kursi di Ruang Pelayanan	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	2 orang	2 bulan	78.150.000	161.525.000	83.375.000	APBD	Pelaksanaan PTSP dengan bergabungnya OPD Teknis yang menerbitkan rekomendasi perizinan pada OPD DPMPT
2.12 - 2.12.0101 - 2.52	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor			Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	12 bulan	12 bulan	27.500.000	27.500.000	0	APBD	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
2.12 - 2.12.0101 - 2.53	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasion al			Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	10 unit	10 unit	233.510.000	233.510.000	0	APBD	
2.12 - 2.12.0101 - 2.54	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	servis mebelair kantor	servis mebelair kantor	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	12 bulan	12 bulan	18.000.000	18.000.000	0	APBD	
<b>2.12 - 2.12.0101 - 5</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>							<b>97.749.950</b>	<b>97.749.950</b>	<b>0</b>		
2.12 - 2.12.0101 - 5.18	Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek dan peningkatan Kapasitas Aparatur			Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	1 kegiatan	1 kegiatan	97.749.950	97.749.950	0	APBD	
<b>2.12 - 2.12.0101 - 6</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>- Capaian Nilai Evaluasi Kinerja</b>	<b>- Capaian Nilai Evaluasi Kinerja</b>			<b>- 80 Angka</b>	<b>- 80 Angka</b>	<b>126.190.000</b>	<b>126.190.000</b>	<b>0</b>		
2.12 - 2.12.0101 - 6.9	Penyusunan sistem manajemen mutu							113.500.000	113.500.000	0	APBD	
2.12 - 2.12.0101 - 6.11	Perencanaan dan Koordinasi Program Kegiatan							5.190.000	5.190.000	0	APBD	
2.12 - 2.12.0101 - 6.17	Penyusunan laporan capaian kinerja, keuangan, barang, kepegawaian dan ketatausahaan	laporan keuangan, barang, dan kepegawaian	laporan keuangan, barang, dan kepegawaian	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	48 dokumen	48 dokumen	7.500.000	7.500.000	0	APBD	
<b>2.12 - 2.12.0101 - 15</b>	<b>Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>	<b>- Cakupan Pemberdayaan Kerjasama dengan BUKP - Jumlah Investor</b>	<b>- Cakupan Pemberdayaa n Kerjasama dengan BUKP - Jumlah Investor</b>			<b>- 0 Kec - 8 Investor</b>	<b>- 0 Kec - 8 Investor</b>	<b>333.225.000</b>	<b>333.225.000</b>	<b>0</b>		



2.12 - 2.12.0101 - 15.18	Peningkatan Koordinasi Kerjasama di Bidang Penanaman Modal	Terwujudnya Kerjasama Antara UMKMK dengan Pengusaha Besar	Terwujudnya Kerjasama Antara UMKMK dengan Pengusaha Besar	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	2 kali	2 kali	15.050.000	15.050.000	0	APBD	
2.12 - 2.12.0101 - 15.19	Peningkatan Promosi Penanaman Modal	Terinformasikan nya Potensi dan Peluang Penanaman Modal	Terinformasika nnya Potensi dan Peluang Penanaman Modal	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	3 kali	3 kali	147.625.000	147.625.000	0	APBD	
2.12 - 2.12.0101 - 15.20	Pengembangan Potensi Penanaman Modal	Terwujudnya Pengembangan Potensi Penanaman Modal	Terwujudnya Pengembangan Potensi Penanaman Modal	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	3 kegiatan	3 kegiatan	170.550.000	170.550.000	0	APBD	
<b>2.12 - 2.12.0101 - 16</b>	<b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>	<b>- Jumlah fasilitasi dan koordinasi kebijakan dan kerjasama di bidang investasi</b>	<b>- Jumlah fasilitasi dan koordinasi kebijakan dan kerjasama di bidang investasi</b>			<b>- 9 Kali</b>	<b>- 9 Kali</b>	<b>137.875.000</b>	<b>137.875.000</b>	<b>0</b>		
2.12 - 2.12.0101 - 16.16	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Terpantauanya perkembangan penanaman modal	Terpantauanya perkembangan penanaman modal	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	1 Kegiatan	1 Kegiatan	51.325.000	51.325.000	0	APBD	
2.12 - 2.12.0101 - 16.18	Pengembangan Kebijakan Penanaman Modal	Tersedianya Kajian dan Koordinasi Penanaman Modal	Tersedianya Kajian dan Koordinasi Penanaman Modal	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	3 kegiatan	3 kegiatan	86.550.000	86.550.000	0	APBD	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>
<b>4.07 - 2.12.0101 - 23</b>	<b>Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi</b>	<b>- Cakupan pengendalian persuratan - Aplikasi SIM Pelayanan On Line Perizinan dan Nonperizinan</b>	<b>- Cakupan pengendalian persuratan - Aplikasi SIM Pelayanan On Line Perizinan dan Nonperizinan</b>			<b>- 0 % - 1 paket</b>	<b>- 0 % - 1 paket</b>	<b>324.075.355</b>	<b>324.075.355</b>	<b>0</b>		
4.07 - 2.12.0101 - 23.1	Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik	Pendaftaran dan penerbitan izin secara online	Pendaftaran dan penerbitan izin secara online	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	1 paket	1 paket	324.075.355	324.075.355	0	APBD	
<b>4.07 - 2.12.0101 - 28</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintahan</b>	<b>- Koordinasi pelaksanaan Pemerintahan ditingkat kecamatan - Layanan perizinan sesuai standar manajemen mutu</b>	<b>- Koordinasi pelaksanaan Pemerintahan ditingkat kecamatan - Layanan perizinan sesuai standar manajemen mutu</b>			<b>- 0 kali - 100 %</b>	<b>- 0 kali - 100 %</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

4.07 - 2.12.0101 - 28.11	Pendampingan pelaksanaan standar manajemen mutu			Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	1 dokumen	1 dokumen	0	0	0		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.07 - 2.12.0101 - 31	Program Peningkatan Pengelolaan Perijinan	- Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perizinan terhadap izin terbit - Pelaksanaan penyampaian informasi perizinan dan nonperizinan melalui Pameran Bantul Ekspo - Pelaksanaan Lokakarya penanganan pengaduan - Pelaksanaan lokakarya pengawasan dan pengendalian - Pelaksanaan Pengkajian perda tentang perizinan dan penanaman modal - Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat - Aplikasi SIM dalam layanan perijinan - Pelaksanaan sosialisasi pengelolaan perizinan - Prosentase penyelesaian pengaduan - Persentase penetapan izin sesuai SOP - Prosentase Verifikasi Permohonan berkas sesuai	- Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perizinan terhadap izin terbit - Pelaksanaan penyampaian informasi perizinan dan nonperizinan melalui Pameran Bantul Ekspo - Pelaksanaan Lokakarya penanganan pengaduan - Pelaksanaan lokakarya pengawasan dan pengendalian - Pelaksanaan Pengkajian perda tentang perizinan dan penanaman modal - Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat - Aplikasi SIM dalam layanan perijinan - Pelaksanaan sosialisasi pengelolaan perizinan - Prosentase penyelesaian pengaduan - Persentase penetapan			- 0 izin - 1 kali - 1 kali - 1 kali - 2 perda - 2 kali - 9 Aplikasi - 12 kali - 90 % - 91 % - 100 % - 7100	- 0 izin - 1 kali - 1 kali - 1 kali - 2 perda - 2 kali - 9 Aplikasi - 12 kali - 90 % - 91 % - 100 % - 7100	806.586.000	1.008.086.000	201.500.000		

		<b>SOP - Pelaksanaan pengawasan proses pelayanan perizinan dan nonperizinan</b>	<b>izin sesuai SOP - Prosentase Verifikasi Permohonan berkas sesuai SOP - Pelaksanaan pengawasan proses pelayanan perizinan dan nonperizinan</b>									
4.07 - 2.12.0101 - 31.2	Sosialisasi pengelolaan perijinan			Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	600 orang	600 orang	238.870.000	238.870.000	0	APBD	
4.07 - 2.12.0101 - 31.4	Operasional pelayanan perijinan	Peningkatan operasional pelayanan perijinan	Peningkatan operasional pelayanan perijinan	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	12 bulan	12 bulan	53.150.000	53.150.000	0	APBD	
4.07 - 2.12.0101 - 31.5	Pendataan dan penetapan perijinan	Terlaksananya tinjauan lokasi/pemerik saan berkas izin, jumlah ijin terbit	Terlaksananya tinjauan lokasi/pemerik saan berkas izin, jumlah	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	7.000 izin	7.000 izin	110.375.000	110.375.000	0	APBD	

		dalam 1 tahun	ijin terbit dalam 1 tahun									
4.07 - 2.12.0101 - 31.6	Penyelesaian pengaduan dan wasdal perijinan	Terselesaikannya pengaduan dari masyarakat	Terselesaikannya pengaduan dari masyarakat	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	90 %	90 %	13.913.000	13.913.000	0	APBD	
4.07 - 2.12.0101 - 31.7	Pengkajian peraturan daerah tentang perijinan	terbitnya izin yang akurat dan taat hukum	terbitnya izin yang akurat dan taat hukum	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	2 perda	2 perda	75.130.000	75.130.000	0	APBD	
4.07 - 2.12.0101 - 31.10	Pengelolaan perijinan online	Pelaksanaan perijinan secara online	Pelaksanaan perijinan secara online	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	12 bulan	12 bulan	186.325.000	387.825.000	201.500.000	APBD	Pelaksanaan PTSP dengan bergabungnya OPD teknis yang menerbitkan rekomendasi perizinan pada OPD DPMPT
4.07 - 2.12.0101 - 31.13	Survei kepuasan masyarakat	Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat	Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	2 dokumen	2 dokumen	6.525.000	6.525.000	0	APBD	
4.07 - 2.12.0101 - 31.16	Penyampaian informasi perijinan melalui pameran bantul ekspo	Penyampaian informasi pelayanan Perizinan melalui Pameran Bantul Expo	Penyampaian informasi pelayanan Perizinan melalui Pameran Bantul Expo	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	1 kegiatan	1 kegiatan	29.070.000	29.070.000	0	APBD	
4.07 - 2.12.0101 - 31.17	Lokakarya penanganan pengaduan	Terlaksananya lokakarya penanganan pengaduan, pengawasan dan pengendalian perijinan	Terlaksananya lokakarya penanganan pengaduan, pengawasan dan pengendalian perijinan	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	1 kegiatan	1 kegiatan	23.084.000	23.084.000	0	APBD	
4.07 - 2.12.0101 - 31.24	Pengawasan dan Pengendalian Perijinan	pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian perijinan	pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian perijinan	Kabupaten Bantul	Kabupaten Bantul	200 izin	200 izin	46.084.000	46.084.000	0	APBD	
4.07 - 2.12.0101 - 31.25	Lokakarya Pengawasan dan Pengendalian Perizinan							24.060.000	24.060.000	0	APBD	
	<b>Jumlah</b>							<b>3.345.701.455</b>	<b>3.670.451.455</b>	<b>324.750.000</b>		

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

Pada dasarnya seluruh Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul dalam mewujudkan Visi dan Misi yang telah dirumuskan dan untuk mendukung terwujudnya Visi Kabupaten Bantul. Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi pihak-pihak terkait (*stakeholders*).

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra), yang dijabarkan dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Mengkomunikasikan rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Hal ini penting dilakukan guna mendukung keberhasilan implementasi renstra dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat;
2. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholders* yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;
3. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
4. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja

dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Dokumen Perubahan rencana Kerja (Renja) Tahun 2018 yang telah dirumuskan bersama ini, kiranya dapat menjadi acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu. Perubahan Renja Tahun 2018 diharapkan juga menjadi acuan evaluasi di akhir tahun nanti. Harus diupayakan ada konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian target di akhir tahun.

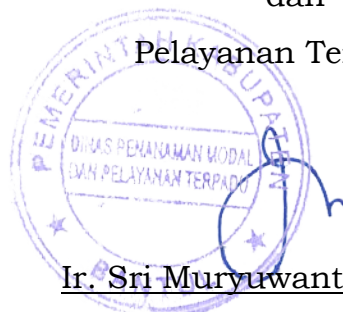
Bantul, 23 Juli 2018

Kepala

Dinas Penanaman Modal

dan

Pelayanan Terpadu



Ir. Sri Muryuwantini, MM

NIP. 19620309 198903 2 002

